

**QRIS CROSS-BORDER SEBAGAI *FINANCIAL STATECRAFT*
INDONESIA TERHADAP DOMINASI AMERIKA SERIKAT
DALAM SISTEM KEUANGAN INTERNASIONAL**

SKRIPSI

UNIVERSITAS ANDALAS

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik pada

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Andalas

Oleh:

RAHMI

2210851008



Pembimbing I: Dr. Virtuous Setyaka, S.IP, M.Si

Pembimbing II: Zulkifli Harza, S.IP., M.Soc.Sc

**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) Cross-Border sebagai instrumen *financial statecraft* Indonesia dalam merespons dominasi struktural Amerika Serikat dalam sistem keuangan internasional. Dominasi dolar AS serta penguasaan infrastruktur pembayaran global menciptakan ketergantungan struktural dan kerentanan eksternal bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, terutama dalam stabilitas nilai tukar dan sistem pembayaran lintas batas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan data sekunder, serta kerangka teori *financial statecraft* dari Leslie Elliott Armijo untuk menganalisis strategi defensif dan ofensif Indonesia melalui implementasi QRIS Cross-Border. Dalam penelitian ini, Bank Indonesia diposisikan sebagai aktor utama negara dalam pengelolaan otoritas moneter dan sistem pembayaran, dengan dukungan kebijakan ekonomi eksternal dari pemerintah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara defensif, QRIS Cross-Border berkontribusi dalam memperkuat otonomi moneter melalui peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara serta pengurangan ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi ritel. Integrasi QRIS dengan kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS) dan penguatan infrastruktur pembayaran nasional juga memperkuat kedaulatan sistem pembayaran Indonesia dengan mengurangi ketergantungan terhadap jaringan pembayaran internasional. Sementara itu, secara ofensif dalam kerangka *financial statecraft*, QRIS Cross-Border meningkatkan peran Indonesia dalam integrasi sistem pembayaran regional melalui perluasan interoperabilitas QR dengan negara-negara ASEAN dan mitra non-ASEAN, sehingga memperkuat posisi Indonesia dalam inisiatif konektivitas pembayaran kawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa QRIS Cross-Border berfungsi sebagai instrumen strategis yang memperkuat kemandirian finansial Indonesia sekaligus meningkatkan pengaruhnya di tingkat regional.

Kata kunci: QRIS Cross-Border, *Financial Statecraft*, De-dolarisasi, *Local Currency Settlement*.

ABSTRACT

The enactment of the National Security Law by China in 2020 has weakened the “One Country, Two Systems” principle and restricted civil liberties in Hong Kong, triggering the emergence of the #MilkTeaAlliance movement as a form of transnational digital activism involving Hong Kong, Taiwan, Thailand, and Myanmar. This study aims to analyze the strategies of the #MilkTeaAlliance movement in countering China's authoritarianism against Hong Kong's democracy using descriptive qualitative research methods with secondary data analysis. This study uses Sandor Vegh's concept of digital activism, which divides strategies into three categories: awareness/advocacy, organization/mobilization, and action/reaction. The results show that the #MilkTeaAlliance movement was able to implement all three strategies effectively. Through awareness/advocacy, the movement was able to shape global public opinion and expand cross-border solidarity by utilizing the X platform (formerly Twitter) and memes as its main communication tools. In terms of organization/mobilization, the movement successfully coordinated online and offline actions and built a flexible network of activists despite facing severe repression. Meanwhile, the action/reaction strategy manifested itself in a meme war and digital campaigns that directly challenged China's nationalist narrative. Although it has not yet succeeded in achieving its main goal of repealing the National Security Law, the #MilkTeaAlliance movement has been able to frame the issue of Chinese authoritarianism as a common agenda for Asia and raise global awareness of the Hong Kong democracy crisis by utilizing the power of social media to disseminate information, organize actions, and carry out effective digital protests, while facing pressure and restrictions from the authoritarian regime.

Keywords: *Authoritarianism; China; Digital Activism; Hong Kong Democracy; #MilkTeaAlliance Movement;*

